



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kawasan perbatasan negara, perlu dibangun monumen kawasan perbatasan negara sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Monumen Kawasan Perbatasan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

3. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Monumen Kawasan Perbatasan Negara, adalah bangunan yang bercirikan karakteristik bangsa Indonesia.
2. Gapura Perbatasan Negara, yang selanjutnya disingkat Gapura adalah berbentuk struktur pilar bangunan yang berkarakteristik bangsa Indonesia dan kedaerahan setempat.
3. Tugu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tugu NKRI adalah bangunan menjulang berkarakteristik bangsa Indonesia.
4. Patung Soekarno adalah bangunan patung Presiden Pertama Republik Indonesia sebagai Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pos Lintas Batas Negara, yang selanjutnya disingkat PLBN, adalah tempat pemeriksaan orang dan/atau barang keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah

Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat dengan BNPP, adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

BAB II

BENTUK MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 2

Bentuk bangunan Monumen Kawasan Perbatasan Negara, meliputi:

- a. Gapura;
- b. Tugu NKRI; dan
- c. Patung Soekarno.

Pasal 3

Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, melambangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Garuda Pancasila lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaerahan setempat.

Pasal 4

Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, melambangkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Garuda Pancasila lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, melambangkan kobaran semangat yang digelorkan Soekarno untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
DESAIN

Bagian Kesatu
Gapura

Pasal 6

Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. bagian tengah;
- b. Garuda Pancasila; dan
- c. bagian sisi kanan dan kiri.

Pasal 7

Bagian tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan bagian utama bangunan sebagai penyangga Gapura dan Garuda Pancasila.

Pasal 8

Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Bagian sisi kanan dan kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penopang bangunan utama yang diberi ornamen kedaerahan setempat.

Pasal 10

- (1) Bangunan utama Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tinggi 11,4 (sebelas koma empat) meter.
- (2) Bangunan sisi kanan dan kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan tinggi 7,5 (tujuh koma lima) meter.
- (3) Jalur bagian kanan dan kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, masing-masing dengan tinggi dan lebar 5 (lima) meter.

Bagian Kedua

Tugu NKRI

Pasal 11

Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tiang penyangga utama;
- b. trap/tangga;
- c. bunga teratai;
- d. tiang penyangga atas; dan
- e. Garuda Pancasila.

Pasal 12

Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan tinggi 17 (tujuh belas) meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

Tiang penyangga utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dengan tinggi 8 (delapan) meter yang melambangkan bulan Agustus yaitu bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

Trap/tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berjumlah 45 (empat puluh lima) yang melambangkan tahun 1945 yaitu tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Bunga teratai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, melambangkan keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar kawasan perbatasan negara.

Pasal 16

Tiang penyangga atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, melambangkan kemegahan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Garuda Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditempatkan paling atas yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagian Ketiga

Patung Soekarno

Pasal 18

- (1) Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dengan tinggi 6 (enam) meter.
- (2) Patung Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bagian Patung Soekarno; dan
 - b. bagian belakang Patung Soekarno.

Pasal 19

Bagian Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, posisi berdiri dengan tangan kiri memegang tongkat komando dan tangan kanan menunjuk kedepan.

Pasal 20

Bagian belakang Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri atas 8 (delapan) pilar berbentuk lengkungan.

BAB IV BAHAN DAN WARNA

Pasal 21

- (1) Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terbuat dari bahan beton bertulang.
- (2) Gapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas warna:
 - a. Garuda Pancasila warna emas dengan perisai berwarna; dan
 - b. Gapura warna merah dan putih.

Pasal 22

- (1) Tugu NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terbuat dari bahan beton bertulang.
- (2) Tugu NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas warna:
 - a. Garuda Pancasila warna emas dengan perisai berwarna; dan
 - b. Tugu NKRI warna merah dan putih.

Pasal 23

- (1) Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terbuat dari bahan beton bertulang atau bahan perunggu.
- (2) Patung Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwarna hitam.

BAB V PENEMPATAN

Pasal 24

- (1) Gapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibangun di depan pintu keluar dan masuk PLBN.
- (2) Tugu NKRI dan Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c dibangun di kawasan PLBN dan di lokasi strategis kawasan perbatasan negara.

BAB VI PEMBANGUNAN

Pasal 25

- (1) Pembangunan Gapura dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pembangunan Tugu NKRI dan Patung Soekarno dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan Tugu NKRI dan Patung Soekarno dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Kepala BNPP.

Pasal 26

Pembangunan Tugu NKRI dan Patung Soekarno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diluar kawasan PLBN yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dapat dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat mengembangkan area sekitar Tugu NKRI dan Patung Soekarno yang berada diluar kawasan PLBN.
- (2) Pengembangan area sekitar Tugu NKRI dan Patung Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tempat rekreasi atau pariwisata.
 - b. aktivitas perekonomian.
 - c. tempat olahraga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Desain, ukuran, dan warna Monumen Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 29

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

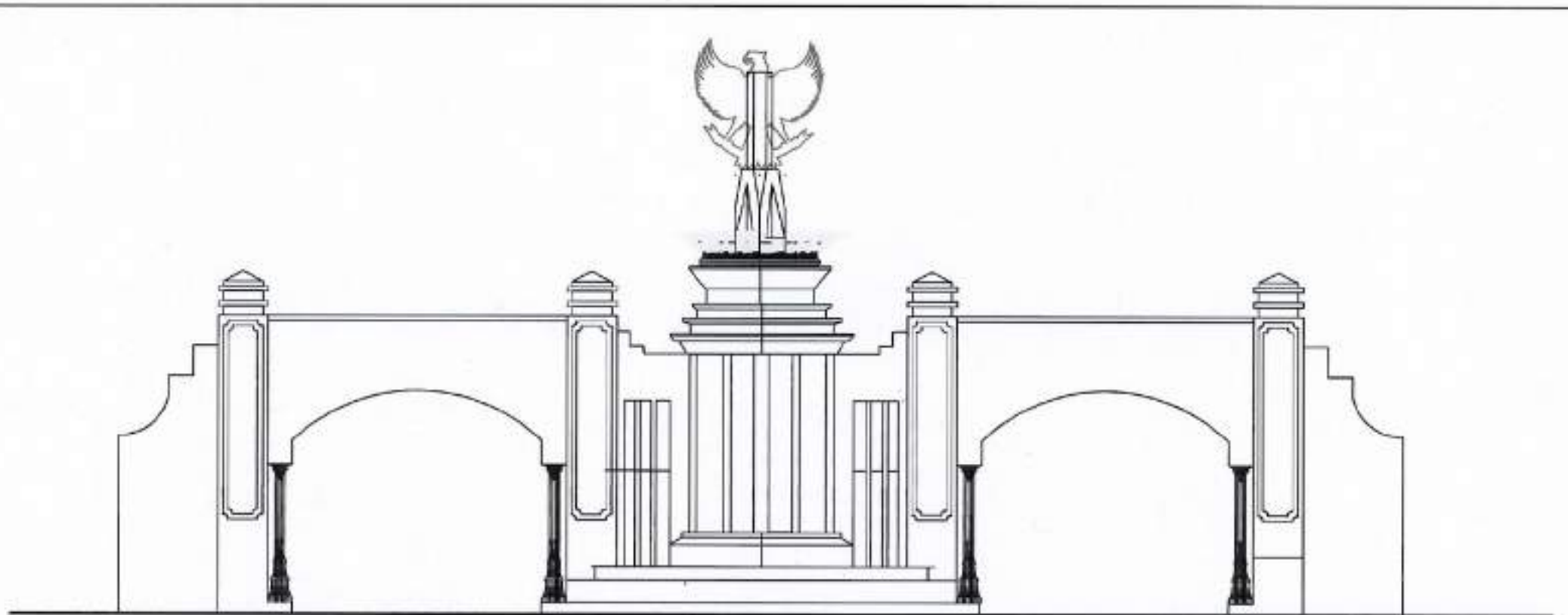
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1204

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian

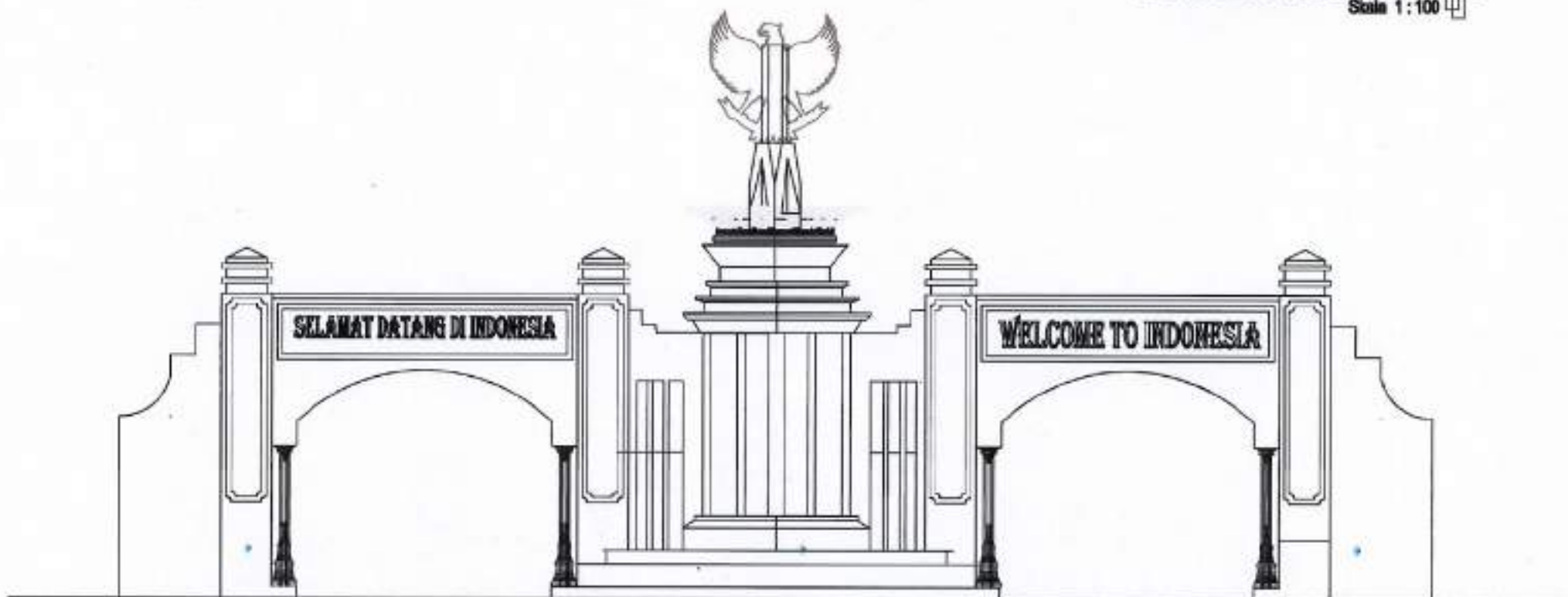


Dr. GUTMEN WAINGGOLAN, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19710817 200212 1 001



TAMPAK BELAKANG GAPURA
Skala 1:100



TAMPAK DEPAN GAPURA
Skala 1:100



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kebon Kacang No. 31 Jakarta Pusat - 10940
Telp./Fax : 021-51423420/1094201, Website www.bnpp.go.id

PERJANJIAN

DEKORASI GAPURA SELAMAT DATANG
PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMUA DAERAH PERBATASAN MOR

MENGETAHUI / MENYETUJUI

ADEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
SELATAN PEJABAT PEMERINTAH KEMENTERIAN

M. Lubis

Dr. MUBANDI EDHIS, M.Si
NIP. 19750110803001

PEMERINTAH

PARTICIPANT / KONTRAKSI HASIL PERUSAHAAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
MELAYU

Dr. MUBANDI EDHIS, M.Si
NIP. 19750110803001

KONSULTAN PERENCANA



RK

Amat

Dip

Dit

CATATAN

GAMBAR SKALA

- TAMPAK DEPAN
- TAMPAK BELAKANG 1:100

LSR JML LSR KODE

000



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kelen 888 No. 51 Jakarta Pusat - 10110
Telp./Fax : 021-31423428/10244391, Website www.bnpp.go.id

PERKEMAH

DESAIN GAPURA SELAMAT DATANG
PADA SUKSES NEGARA

LOKASI

SEMAU DAERAH PERBATASAN NIOE

MEMOETAKSI / MEMYETLUSI

ARDEP PENGELOLA BAKAS NEGARA WILAYAH DAERAH
SELAKU PEJABAT PEMBAT KANTOR MENYIK

Mulubol

DR. MUHAMMAD SYAHIM, MSc.
NIP. 196708011980321001

PENYERAH KASER

PANTIAPEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN DATAS WILAYAH
NEGARA

[Signature]
DR. HANIKH HANIKH, MSc.
NIP. 19640110 1988011001

KONSULTAN PERENCANA



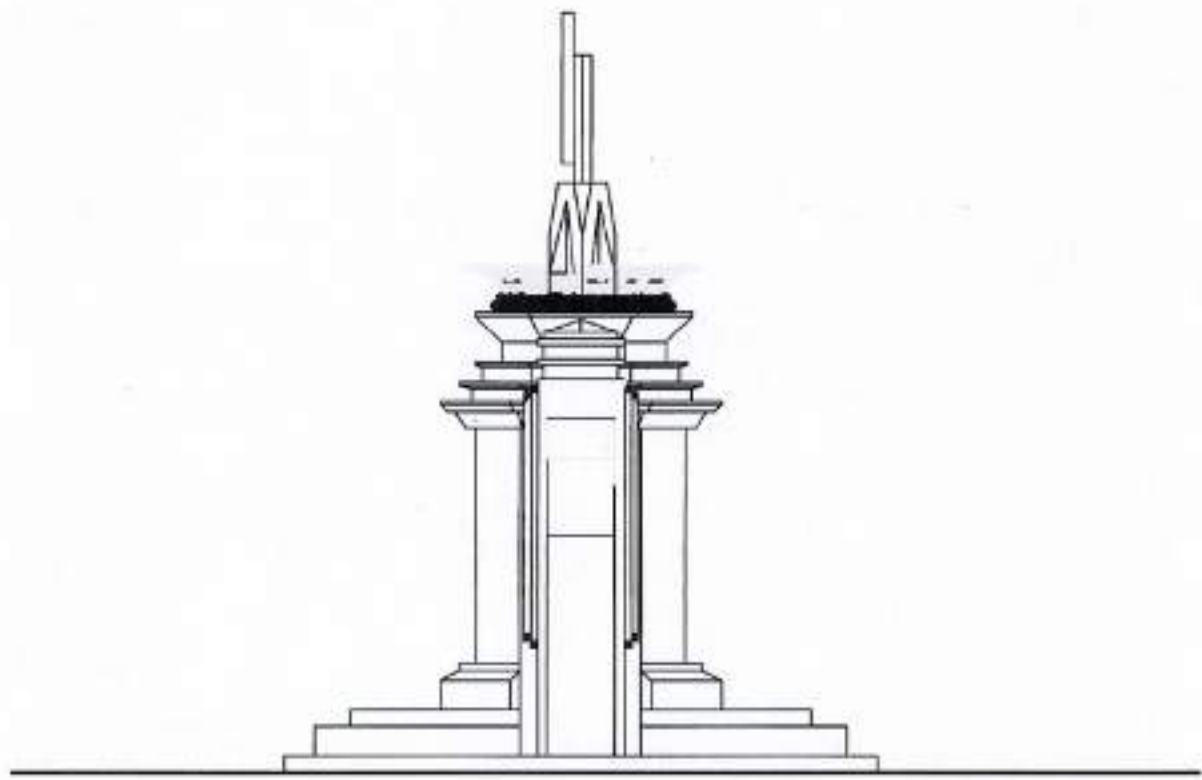
[Signature]
DR. HANIKH HANIKH, MSc.
NIP. 19640110 1988011001

DI. GABUNG PERUSAHA

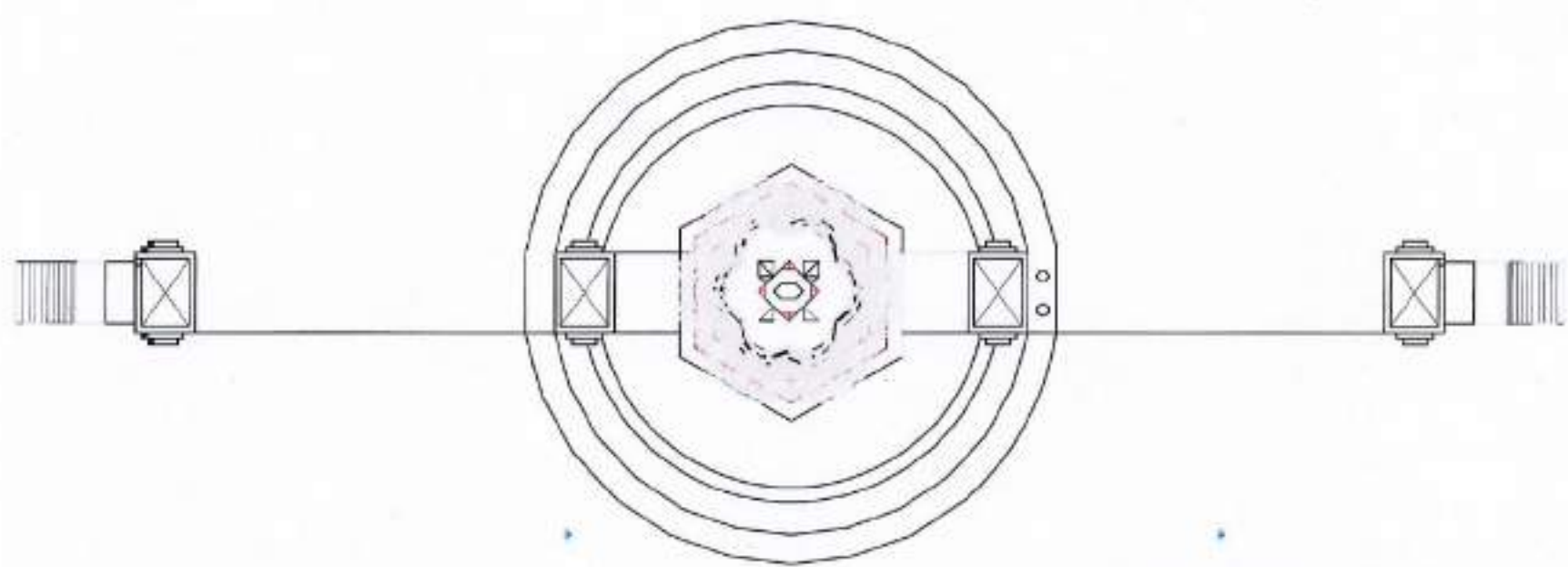
Archi
Dpt
Dra

CKTATAN

GAMBAR		SKALA
- TAMPAK ATAS - TAMPAK SAMPING		1:100
LR	JM. LR	KODE
		OPR

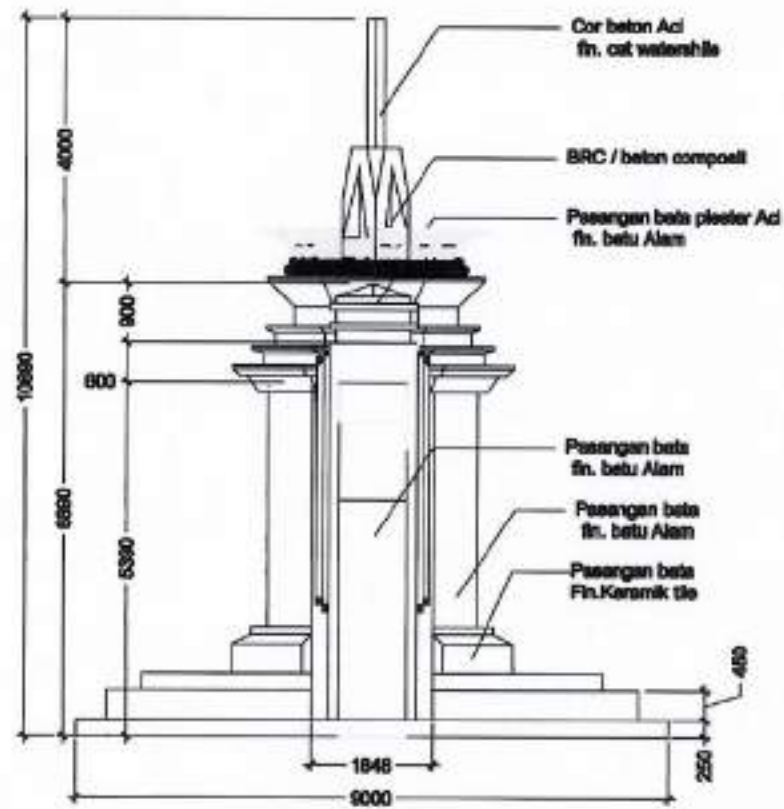


TAMPAK SAMPING GAPURA
Skala 1:100

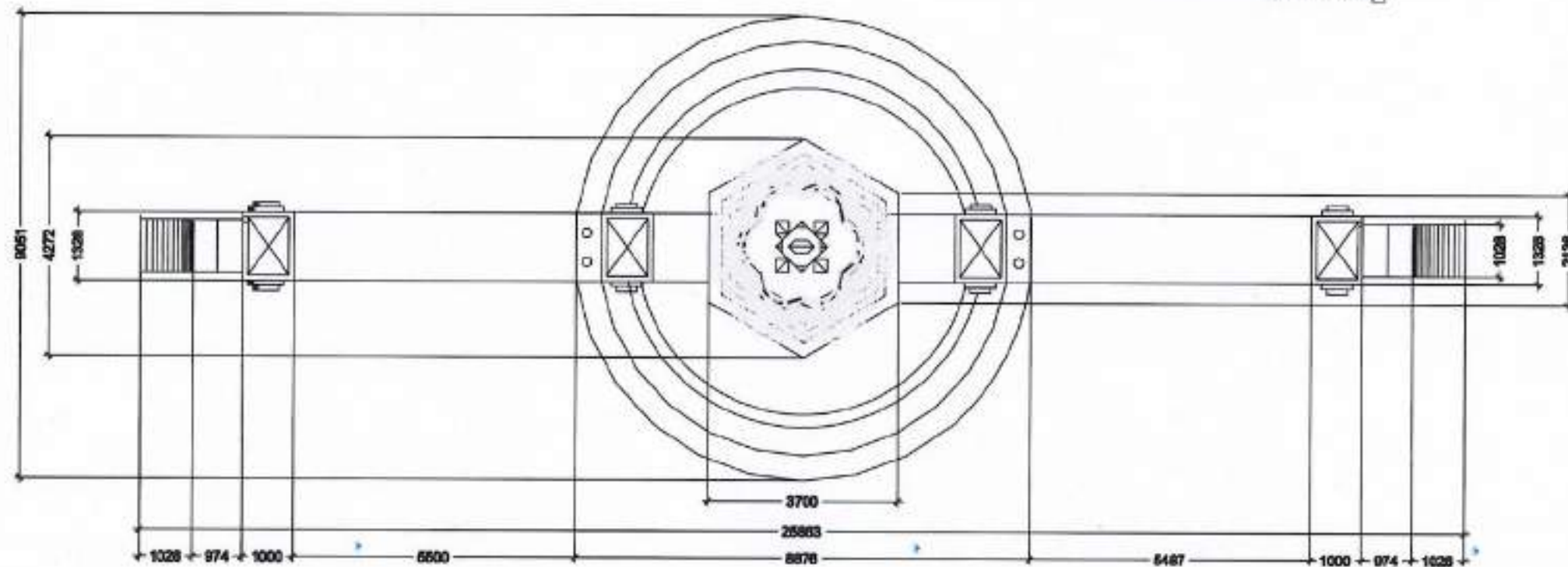


TAMPAK ATAS GAPURA
Skala 1:100

2. UKURAN



DETAIL TAMPAK SAMPING
Scale 1:100



DENAH GAFURA
Scale 1:100



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Keban 888 No. 31 Jakarta Pusat - 10340
Telp./Fax : 021-8142429/1034-0391, Website www.bppg.go.id

PERJULIHAN

DESAIN GAFURA BELAKANG DITANG
PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SOMBA DAERAH PERBATAN INDI

MENGETAHUI / MENYETUJUI

ANDEP PENGELOLA BAKAS NEGARA WILAYAH DAERAH
SELAU PEJABAT PERUBAH KOMITMENIPK

Melaloh

DR. MURAHAY BRUHULAN
NP. 187081 18000101

PEMERINTAH

PANTAPILIHAT PEMERINTAH KEMERJAAN
DEPUTI BANGS PENGELOLAAN BAKAS WILAYAH
NEGARA

DR. MURAHAY BRUHULAN
NP. 187081 18000101

KEBULTAH PERBICARA



Handwritten signature and stamp

Anal

Dpl

Dsh

CATATAN

GAMBAR

SKALA

- DENAH GAFURA
- DETAL TAMPAK SAMPING

1:100

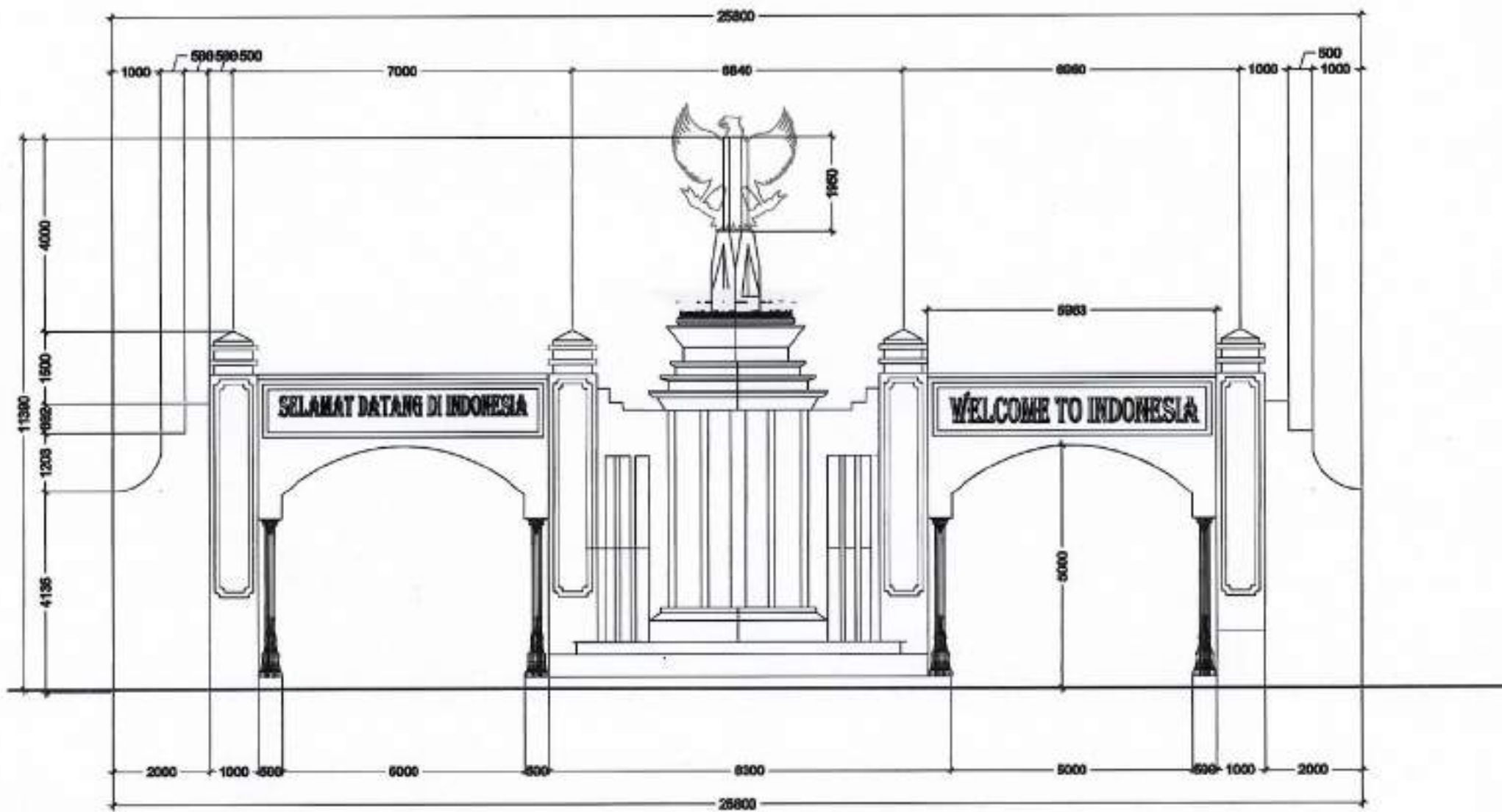
LSR

JML LSR

KODE

011

Handwritten initials



DETAIL TAMPAK DEPAN
 Scale 1:100



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
 REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Kelen 888 No. 51 Jakarta Pusat - 10140
 Telp./Fax : 021-3142420/1804201, Website www.bnpp.go.id

PERUMAH
 DESAIN GUPURA SELAMAT DATANG
 PADA SATAS NEGARA
 LOWAH
 SENJA DAERAH PERBATASAN NINE
 MENGETAHUI / MENYETUJUI
 ADEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
 SELAND PELJADAT PEMBUAT KOMITMENIPV.

Melabli

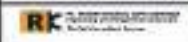
DR. NARSIAN BRARUMAS
 N.P. 0000011880001

PERUSAHAAN

PARTICIPANT PERUSAHAAN PERUMAH
 DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
 NEGARA

DR. HANUM HARRUN, M.B.
 N.P. 000001128001001

KONSTRUKSI PERENCANA



[Signature]
 PT. BOMAR PRABANDI SENTRA
 KAWASAN PERBATASAN

Archi
 Sipil
 Draft

CATATAN

GAMBAR		SKALA
- DENAH GUPURA - DETAIL TAMPAK DEPAN		1:100
LDR	JM. LDR	HOOE
		OPR



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Keban 88b No. 91 Jakarta Pusat - 10140
Telp. Fax : 021-51423420-1024-4391, Website www.bnppg.go.id

PERJANJIAN

DENAH GUPURA BELAKANG DAUNGS
PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMBA DAUNGS PERBATASAN NKRI

MEGETAJI / MENYETUJAI

ANDEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH BARAT
SELAKU PELAJAT PEMBUAT KOMITMENPPK

Mahabib

Dr. MAHABIB BRAHMA, M.Si
NIP. 19620901196801001

PENERIMA HASIL

PANTAIPEJABAT PENERIMA HASIL PEREKUJAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

Dr. SUKAMIR MARRUK, M.E
NIP. 19640510196801001

KONSULTAN PERENCANA



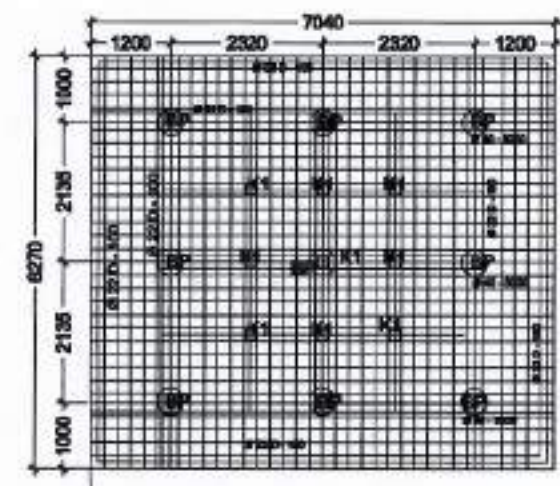
R&K PT. RICHARD RUSSELL CIPUTRA & RE
Konsultansi Perencanaan

Dr. Dedy Dedy
Direktur

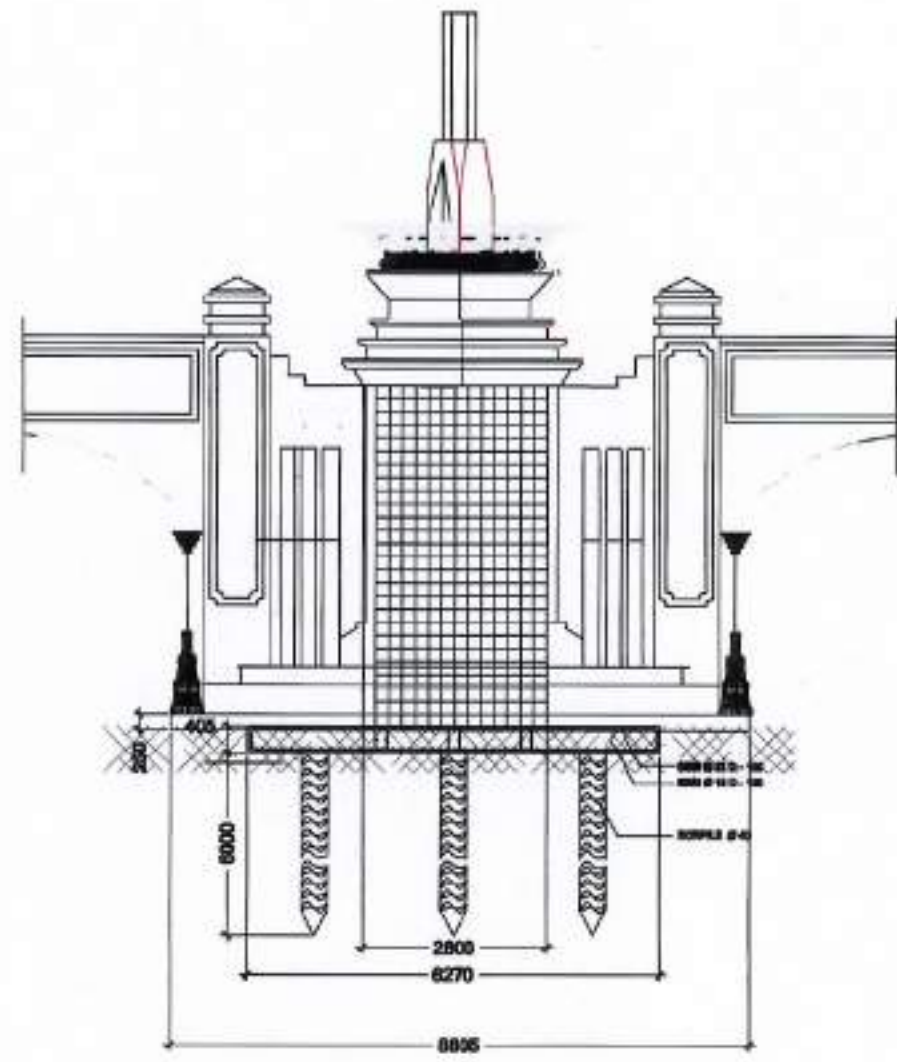
Ambo
Sya
Dedy

CADANGAN

GAMBAR		SKALA
- DENAH PONDASI TAPAK - POTONGAN PONDASI TAPAK		1 : 100
LER	JML. LER	KODE
		OPR



DENAH PONDASI TAPAK
Skala 1 : 100



POTONGAN PONDASI TAPAK
Skala 1 : 100

Handwritten initials

3. WARNA



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIC INDONESIA
J. Kebon Kiri No. 31 Jakarta Pusat - 10910
Telp./Fax : 021-2142343/1044391, Website www.bnpp.go.id

PERUMAHAN

DESAAN GAPURA SELAMAT DATANG
PADA BATAS NEGARA

LOKASI

BINUA DARURAH PERBATASAN NINE

MEMETAKSI / MEMETULSI

ANAK PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
SILANGI PELAJAT PEMBATAS KOMTAMENPPK

Melabeli

Drs. MURRANAN BRAYHA, MEd
NIP. 19670401 198803 001

PENERIMA HASIL

PANITIA PELAJAT PENERIMA HASIL PERUMAHAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

Drs. MURRANAN BRAYHA, MEd
NIP. 19670401 198803 001

KONKULTAH PERENCANA



RK *PERENCANAAN*

1. G. G. G. G.

Archi

Spd

Dokter

DATANG

GAMBAR		SKALA
PERSPEKTIF		NON BOLA
LBR	JML. LBR	KODE
		DPR

Handwritten mark



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
 REPUBLIK INDONESIA
 J. Kebun Gajah No. 31 Jakarta Pusat - 10340
 Telp./Faks : 021-3422423/3034-6381, Website www.bnpp.go.id

PERERJAAN

DEKORASI GUPURA SELAMAT DATANG
 PADA BATAS NEGARA

LOKASI

BENJEL DAERAH PERBATASAN NKRI

MENGETAHUI/MENYETUJUI

AKSI PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DAFTAR
 SELAMU PEJABAT PEMBUKUT KOMITMENBPPK

Melabbi

Drs. MACHMUD IBRAHIM, M.Si
 NIP. 196702119802901

PENERIMA HASIL

PANITIA PELAKSANA PENERIMA HASIL PERERJAAN
 DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
 NEGARA

Drs. MACHMUD IBRAHIM, M.Si
 NIP. 196702119802901

KONSULTAN PERENCANA



RK *SPD*

Andi

Spj

Dra

CATATAN

GAMBAR		BOLA
PERSPEKTIF		NON BOLA
LSR	JAL. LSR	KODE
		071

28



MENTERI DALAM NEGERI,
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN

TJAHJO KUMOLO



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Keban Silih No. 21 Jakarta Pusat - 10340
Telp./Fax : 021-014234301804-0201, Website www.bnpp.go.id

PERIZINAN

DIRAN GAMPURA SELAMAT DATANG
PADABATAS NEGARA

LOKASI

GENERA DAERAH / PERKOTAAN 1000

MEMORANDUM / MEMYETUJAI

ASPEK PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
BELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPPK

Dr. HAYDATHULLAH IBRAHIM, M.Si.
NIP. 19670811198003001

PENERIMA HASIL

PARTICIPANT BENDERA HASIL PERIZINAN
DUPLIKASI BAHAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

Dr. HAYDATHULLAH IBRAHIM, M.Si.
NIP. 19670811198003001

KONSULTAN/PERENCANA

IRK
PT. IRK
Jl. ...
No. ...
Telp. ...
Fax ...
Email ...

To: Dan & Puan
Dikirim

Analisis

Dip

Dokter

GATKDM

GAMBAR		BISULA
PERSPEKTIF		NON-BISULA
LSR	JML. LSR	KODE
		GPR

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

DESAIN, UKURAN DAN WARNA TUGU NKRI

1. DESAIN



 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Kebun Binatang, 21 Jakarta Pusat - 10140 Telp./Fax: 602-39143225/6041021, Website: www.bnpp.go.id													
PERUBAHAN													
DESAIN TUGU NKRI PADA DAERAH PERBATASAN													
LOKASI													
KEMERDEKAAN PERBATASAN NKRI													
KEMENTERIAN / INSTANSI													
KELOMPOK PENGELOLA DAERAH PERBATASAN DAN/ATAU MELAKUKAN PERBATASAN NEGARA													
 DR. M. HUSEIN SAIFULLAH, M.P. KEP. PERBATASAN NKRI													
 DR. SAIFUL HUSEIN, M.P. KEP. DAERAH PERBATASAN NKRI													
 PT. BIKONENSI-12 KONSULTAN JALAN													
No. : Dgn. : Dlm. :													
CATATAN													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">GABUNG</td> <td style="width: 50%;">DOKLA</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">PERUBAHAN</td> <td style="width: 50%;">NKRI-DOKLA</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">LBR</td> <td style="width: 25%;">JIL. LBR</td> <td style="width: 25%;">KODE</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">TU</td> </tr> </table>		GABUNG	DOKLA	PERUBAHAN	NKRI-DOKLA	LBR	JIL. LBR	KODE					TU
GABUNG	DOKLA												
PERUBAHAN	NKRI-DOKLA												
LBR	JIL. LBR	KODE											
			TU										

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Keban 02b No. 20 Jakarta Pusat - 10160
 Telp./Fax: 021-5142343/51044121, Website: www.bnpp.go.id

PEREMBAH

DEKOR TUGU NKRI PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMAJAH DAN PERBATASAN NKRI

MERONGKAI/MEKUTSAI

**ADEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DAERAH
 BELAJU PELUPAT PEMERINTAH KABUPATEN**

Mahidul

Dr. HANUWATI BRUMBA, M.D.
 N.P. 10100010001001

PEREMBAH

**PANTAI PELUPAT PEREMBAH HASIL PEREMBAH
 DEPARTEMEN PENGELOLA BATAS WILAYAH
 NEGARA**

Dr. HANUWATI BRUMBA, M.D.
 N.P. 10100010001001

KONSULTAN PERENCANA

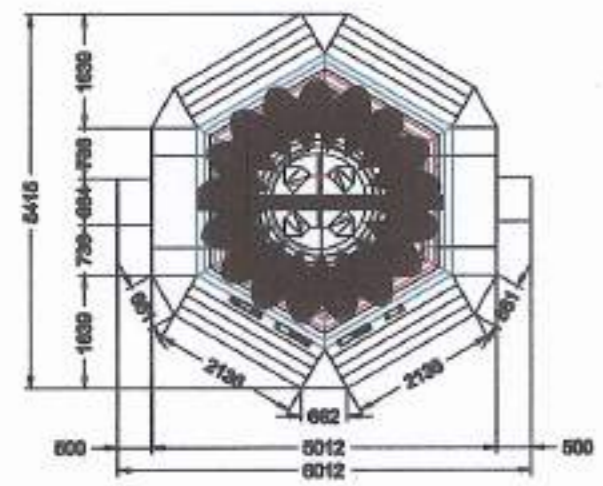
PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN
 (PENGALIHAN WILAYAH DAN PERENCANAAN)
 Jl. Raya Sekeloa Tengah No. 100, Sekeloa Tengah, Palembang, Sumatera Selatan 30132
 Telp: 071-7990000, Fax: 071-7990001, Email: info@inkoneksi-izi.com

[Signature]
INSTRUKSI
Orbita

Arb
 Opt
 Des

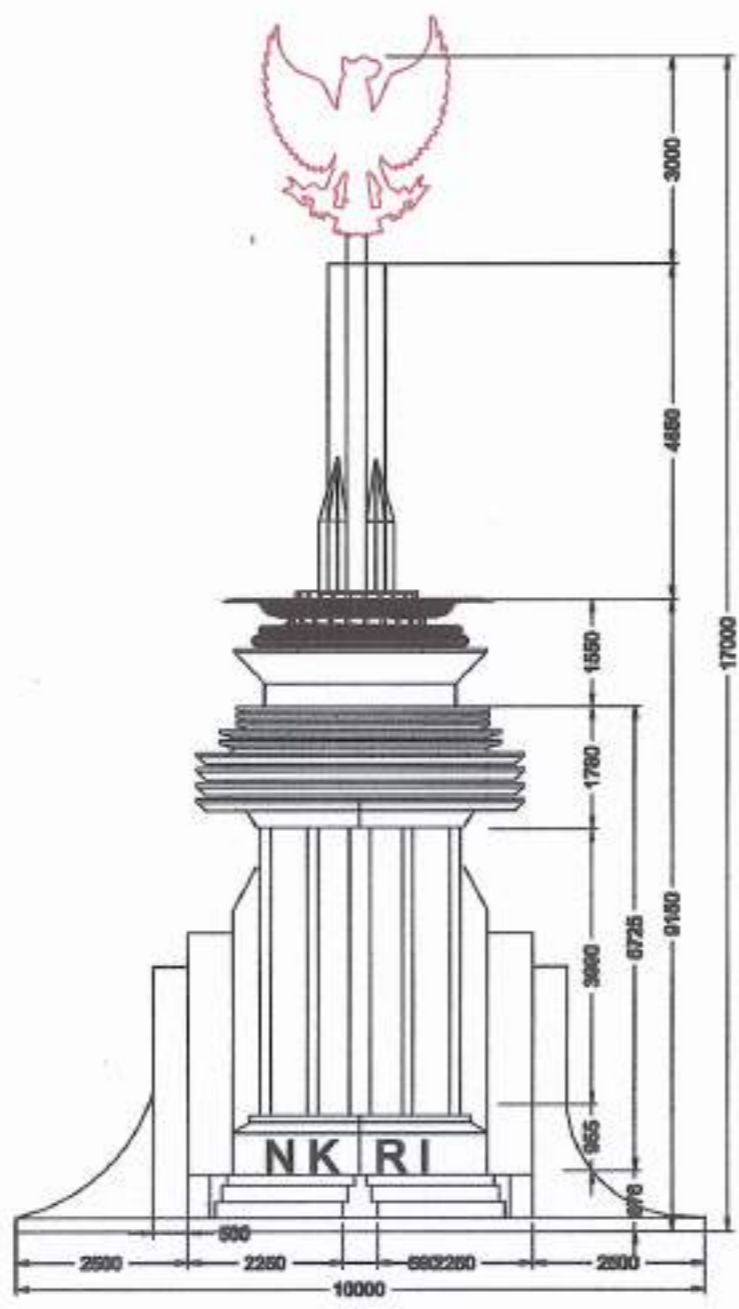
CAKUPAN

GAMBAR	SKALA	
- TAMPAK ATAS - TAMPAK DEPAN - TAMPAK SAMPING	1:100	
LDR	JML LDR	NOOR
		70



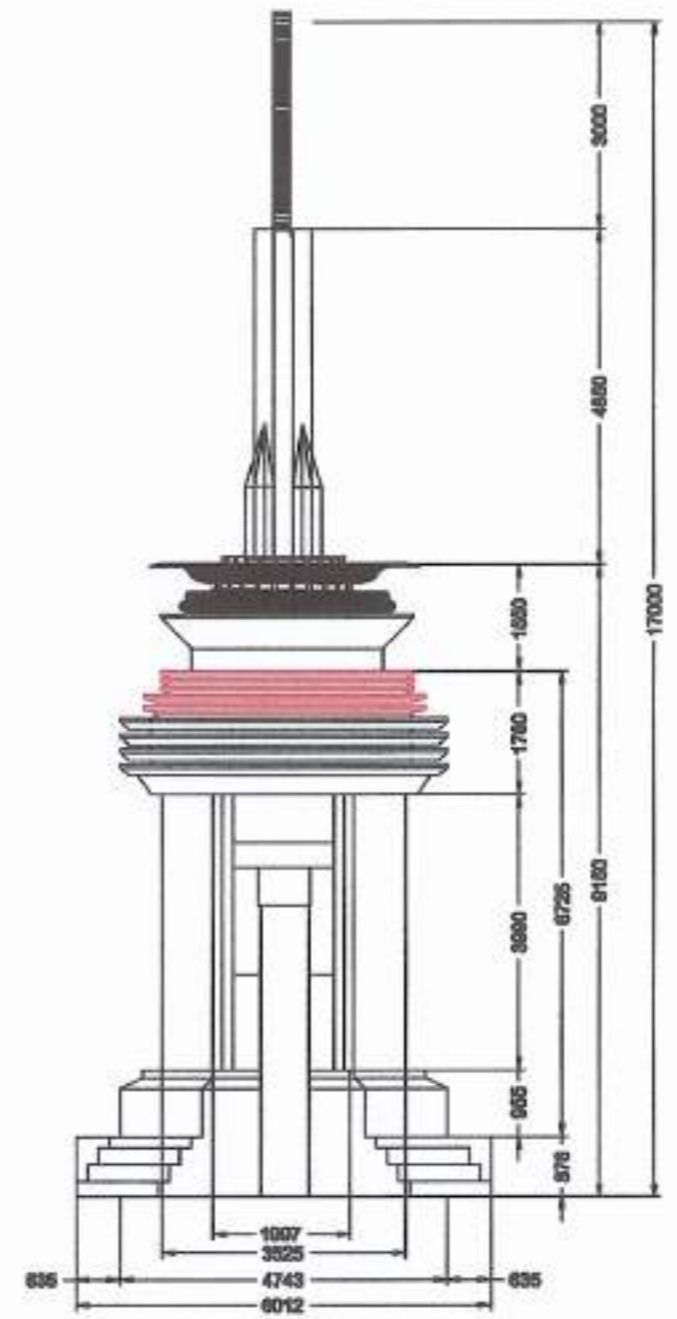
TAMPAK ATAS

Skala 1 : 100



TAMPAK DEPAN

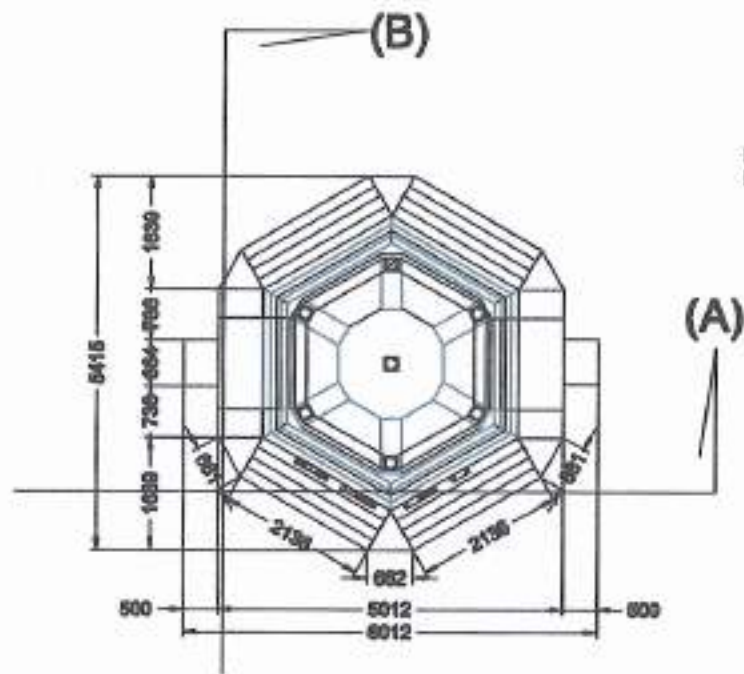
Skala 1 : 100



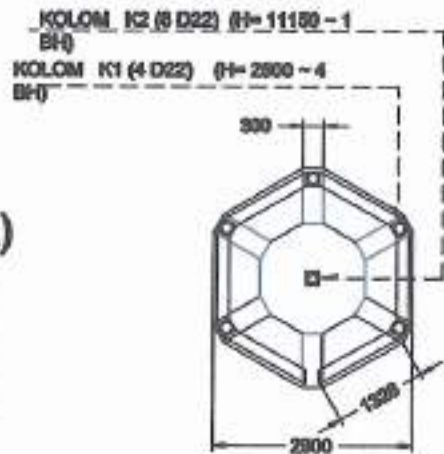
TAMPAK SAMPING

Skala 1 : 100

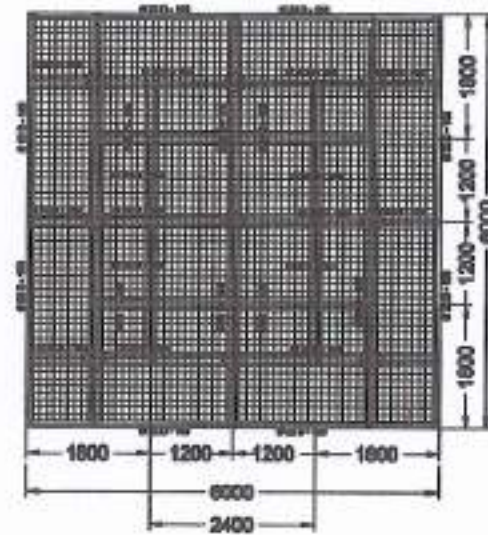
2. UKURAN



TAMPAK ATAS
Skala 1 : 100



DENAH PONDASI ATAS
SKALA 1 : 100



DENAH PONDASI TAPAK
SKALA 1 : 100



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kebon Cendek No. 31 Jakarta Pusat - 10150
Telp./Faks : 021-4422420/021422421, Website www.bnpp.go.id

PERIZINAN

DESAIN TUJUH (VII) PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMAK DARIH PERBATASAN NIS

BERKETAHAN / BERKETAHAN

ASPEK PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
DEKAT PERBATAS PERBATAS KONTINEN

Melubis

Dr. MACHMUD BUDHIS, M.Sc.
NIP. 195701100000000000

PENERIMAHASIL

PWNT/PEJABAT PENERIMA HASIL PERIZINAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

Dr. MACHMUD BUDHIS, M.Sc.
NIP. 195701100000000000

KONSULTAN PERENCANA

PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN
Jl. Raya Sempur No. 100, Sempur, Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah 50132

[Signature]
Irfan, S.T.
Direktur

Arbit

Spes

Draf

GAMBAR

GAMBAR

SKALA

• TAMPAK ATAS
• DENAH PONDASI ATAS
• DENAH PONDASI TAPAK

1 : 100

LEH

JML. LEH

REVISI

70



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kebon Sirih No. 21 Jakarta Pusat - 10340
Telp./Fax : 021-3142342/316044231, Website www.bnpp.go.id

PERUSAHAAN

DESAH TUGU NISI PAGA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMAU DAERAH PERBATASAN NEGARA

MENONTAKAN / MENYETUJUI

ASPEK PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
BELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPPK

Melubola

DR. MARSUDAN BRANHA, M.Sc.
NIP. 1950001198001001

PERUSAHAAN

PARTITIPERJABAT PERUSAHAAN NASAL PERUSAHAAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

DR. MANSUR MARDUK, M.Sc.
NIP. 1964001198001001

KONSULTAN PERENCANA

PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN
INDONESIA

[Signature]
ANAK, S. Siregar
Direktur

Analisis

Skala

Detail

CATATAN

GAMBAR

SKALA

- DENAH PONDASI
- POTONGAN A
- POTONGAN B

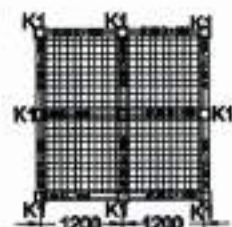
1:100

LEJUR

JML. LEJUR

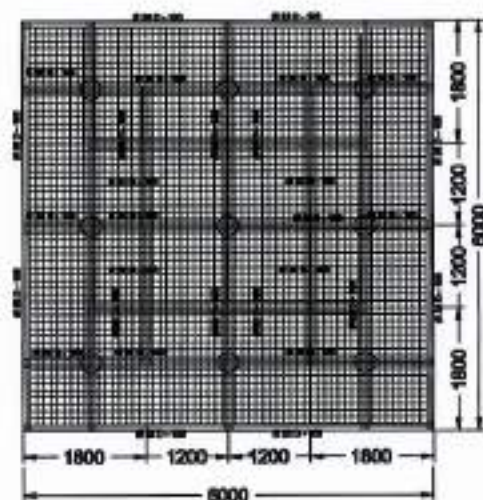
NODE

10



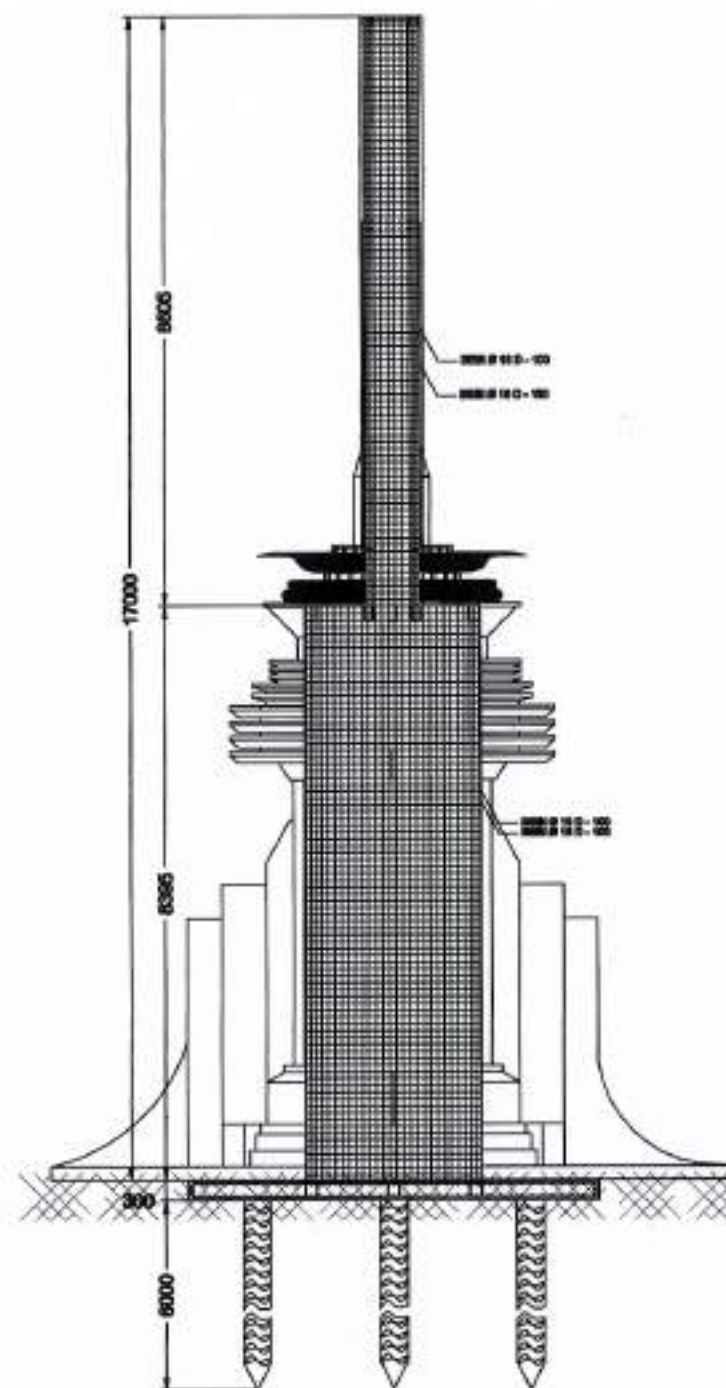
DENAH PONDASI ATAS

SKALA 1:100



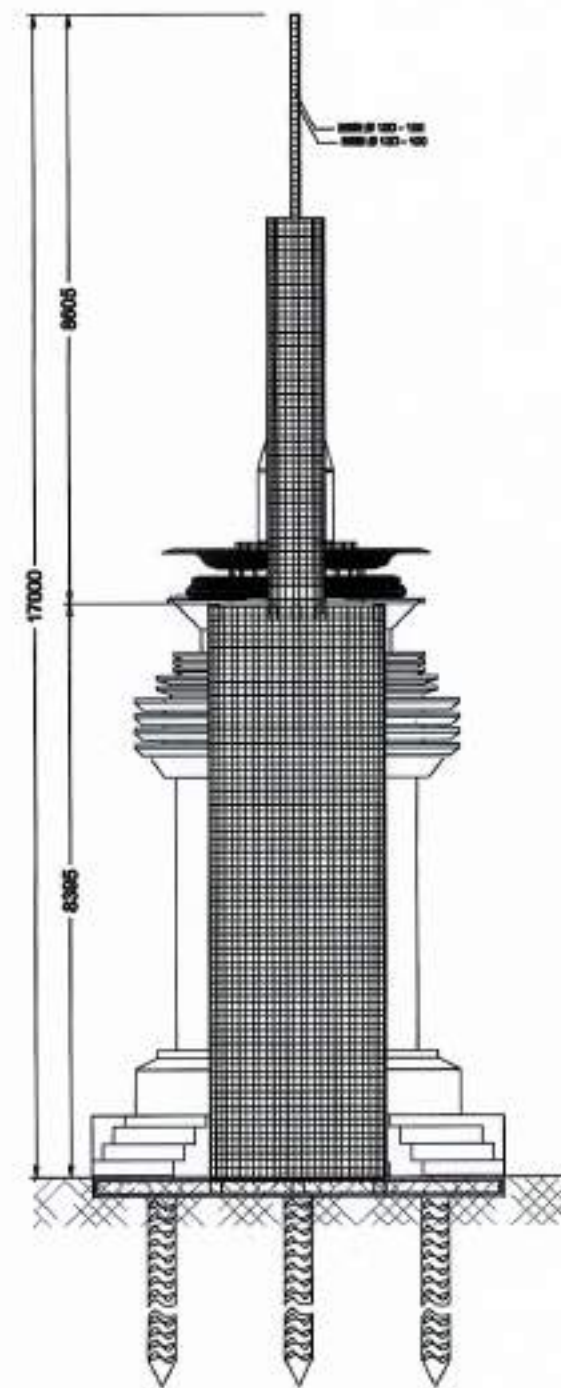
DENAH PONDASI TAPAK

SKALA 1:100



POTONGAN A

SKALA 1:100



POTONGAN B

SKALA 1:100

[Handwritten mark]

2. WARNA




BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
 Jl. Medan 40th No. 21 Jakarta Pusat - 10260
 Telp./Fax: 021-5142242/212544221, Website: www.bnpp.go.id

PERFORMA

DIRAHY TUGU NIKE PADA BAKAS NEGARA

LOKASI

SEMUA DAERAH PERBATASAN NIKE

MEMORANDUM / MEMOTIVASI

ASPEK PENGELOLA BAKAS NEGARA WILAYAH DAFTAR
SELANDI PELANGI PERBATAS KONTAMERPAK


Dr. MARDIANA ERWIN, M.D.
 NIP. 1960001198031001

PERFORMA HAZEL

PANITIA PELANGI PERBATAS JABAL PERSEKAWAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BAKAS WILAYAH
NEGARA


Dr. MARDIANA ERWIN, M.D.
 NIP. 1960001198031001

KONSULTAN PERENCANA


PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN
 JALAN ...
 ...

...

Nama: _____
 Dpt: _____
 Dulu: _____

GAMBAR

GAMBAR		SKALA
PERSEKAWAN		NON SKALA
LEW	JAL. LEW	RODE
		TO

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.



MENTERI DALAM NEGERI
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN,

TJAHJO KUMOLO



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kebon Sirih No. 21 Jakarta Pusat - 10160
Telp./Fax : 021-21422420/1624-4321, Website www.bnpp.go.id

PERERJUAN

DESAIN TUJUH HARI PADA BATAS NEGARA

LOKASI

BUMAH DANRAH PERBATASAN HIRI

MEMGETAHUI / MEMSETUJUI

ASDEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
BELAKU PEJABAT PEMERINTAH KOMITMENPPK

Dwi MAWIDYANINGRUM, M.Eng.
NIP. 1983031983031001

PENERIMA HASIL

PANTAU PELAKSANA PENERIMA HASIL PERERJUAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

Dwi MAWIDYANINGRUM, M.Eng.
NIP. 1983031983031001

KONSULTAN PERENCANA



Arabic

Spj

Draf

CATATAN

DAMPAK		BUNDA
PERSPEKTIF		NON BUNDA
LIR	JML LIR	KODE
		TD

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
NOMOR : 8 TAHUN 2017.
TENTANG
MONUMEN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

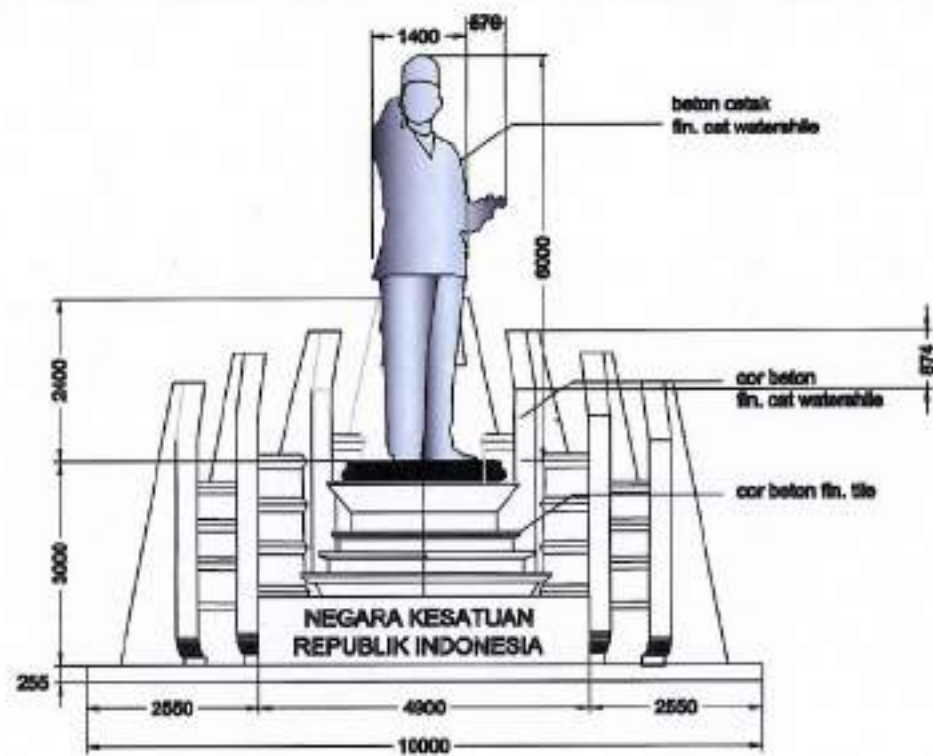
1. DESAIN

DESAIN, UKURAN DAN WARNA PATUNG SOEKARNO



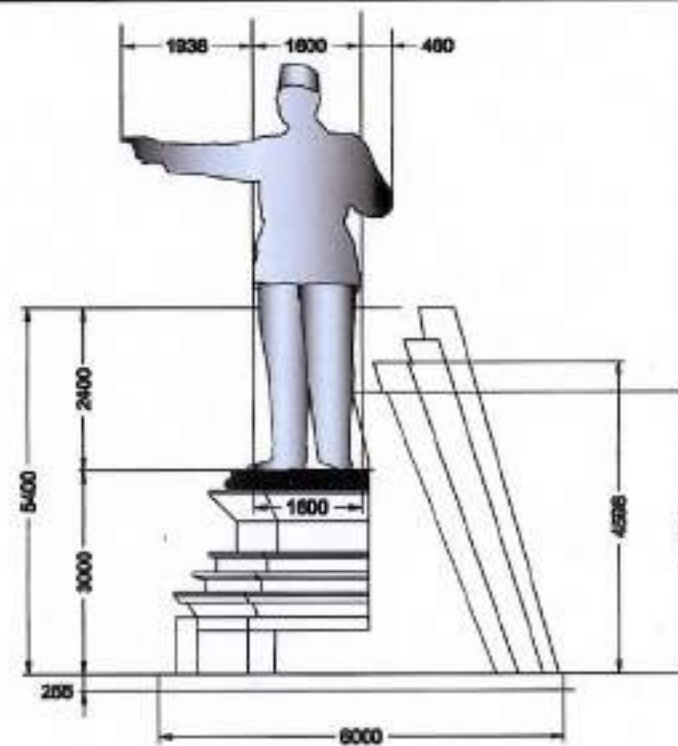
 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Kibin 88 No. 11 Aleria Pabel - 8000 Telp./Fax: 021-42402710/40271, Website: www.bnpb.go.id		
PERUMAH		
DESAIN PATUNG SOEKARNO IVONA SAKTIAS HESRITA		
LOKASI		
KAWASAN PERBATASAN HIRI		
KEMERDEKAAN / MONTENAPULAI		
KORPUS PERBATASAN NEGARA WILAYAH DARAT BELANG PULANGIT PEMERINTAH KEMERDEKAAN		
 Dr. MUZHARWAN SIDIQI, M.Si NIP. 195901100000001		
PERUMAH / PAHL		
PANGKALAN PERBATASAN HIRI, MONTENAPULAI DISTRIK BELANG PULANGIT KAWASAN PERBATASAN NEGARA		
 Dr. MUZHARWAN SIDIQI, M.Si NIP. 195901100000001		
KEBUDHAYAAN PERBATASAN		
 PT. DUTA CIPTA Jl. The Great Street 11 Medan		
Author: _____ Date: _____ Draft: _____		
GAMBAR		
GAMBAR		ISOLA
PERSPEKTIF		NON ISOLA
LIRI	JAL. LIRI	ISOLASI
		PIR

[Handwritten signature]



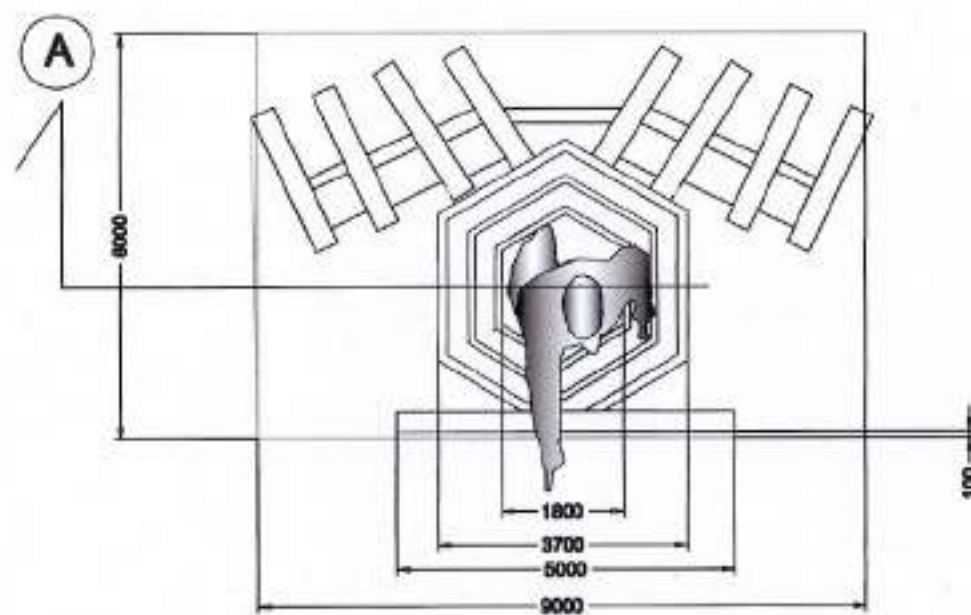
TAMPAK DEPAN

skala 1 : 100



TAMPAK DEPAN

skala 1 : 100



TAMPAK ATAS

skala 1 : 100



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Keban (Giri No. 31 Jakarta Pusat - 10040
Telp./Fax : 021-6142343/10344231, Website www.bnpp.go.id

PERUSAHAAN

DESAH PATUNG BONGKAWO PADA BATAS NEGARA

LOKASI

DESAH DAERAH PERBATASAN 1001

MEMOTAHIRI / MEMYETUJUKAN

ABDIP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
BELAJU PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPPK

Mahabul

DR. MAHABUL BIRAHIM, M.Sc
NIP. 196708011985031001

PENERIMAHASIL

PANITIAPEJABAT PENERIMAHASIL PEKERJAAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN
BATAS MELAYAN NEGARA

DR. MANSUR MARELIN, M.Sc
NIP. 19640819 198803 1 801

KONSULTAN PERENCANA

PT. DUTA CIPTA *Consultancy*



C. Sri Aji (Pimpinan K.L.)
Desain

Arsitek

Spes

Drafter

CADANGAN

GAMBAR

SKALA

- TAMPAK ATAS
- TAMPAK DEPAN
- TAMPAK BANGUNAN

1 : 100

LBR

JML LBR

KODE

PTG

A
G

3. WARNA



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Keben Satrio No. 31 Jakarta Pusat - 10540
Telp./Fax : 021-0142232/16344231, Website www.bnpp.go.id

PEKERJAAN

DESAIN PATUNG BOEKARNO PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMBA DAERAH PERBATASAN NTB

MEMORANDUM / MEMOTIVASI

ANDEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
BELAJU PELANGI PEMBUKTI KOMITMENPPK

M. Mahabadi

DR. MAHABADI ERWAN, M.Sc
NIP. 1967001198031001

PENERIMA HASIL

PANITIA PELAKSANA PENERIMA HASIL PENYUJUAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH NEGARA

DR. MAHABADI ERWAN, M.Sc
NIP. 1967001198031001

KONKRETAN PERENCANA

PT. DITA CIPTA *Consulting*



J. Abu Pasa P. W. W. S. S. S.

Ames

Dip

Du

CATATAN

GAMBAR

SKALA

PERSPEKTIF

NON SKALA

LEB

JML. LEM

KODE

PTG

Ar
8



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Kebon Kiri No. 31 Jakarta Pusat - 10340
Telp./Fax : 021-3142343/31844321, Website www.bnpp.go.id

PEKERJAAN

DIRAJAT PATUNG BODONING PADA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMUA DAERAH PERBATASAN NIDI

MENGETAHUI / MENYETUJUI

ASDEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
SELAKU PELAKU PEMBUKT KOMITMENYK

M. Hudaib

Drs. MUNDIRAH BEYOND, M.Si
NIP. 19670301 1980031001

PEMERINTAH HABSU

PAWITAPELAKU PEMERINTAH HABSU PEKERJAAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA

M. M. M. M.

Drs. MAHMUD MARSUL, M.Si
NIP. 19640218 198003 1 001

KONSULTAN PERENCANA

PT. DUTA OPTA *Consulting*



(Signature)
Direktur

Arsitek

Desain

Drafter

CATATAN

GAMBAR	BUKLA
--------	-------

PERSEKTIIF	NON BUKLA
------------	-----------

LIR	JML. LIR	KODE
		TD

Handwritten initials



**MENTERI DALAM NEGERI,
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL
PENGELOLA PERBATASAN**

TJAHJO KUMOLO



**BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
REPUBLIK INDONESIA**
J. Kebun Raya No. 01 Jakarta Pusat - 10340
Telp./Fax : 021-342343/31834431, Website www.bnpp.go.id

PERJULIHAN

DEBAM PATUNG BOEKARIO PINDA BATAS NEGARA

LOKASI

SEMUA DAERAH PERBATASAN MARI

MEMERINTAH / MEMERINTUJUKAN

**ASDEP PENGELOLA BATAS NEGARA WILAYAH DARAT
SELAKU PEMBAT PEMBUAT KOMITMENUPK**

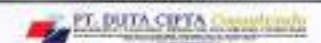
Dr. MARDIANA BRUMA, M.Sc.
NIP. 19670001208031001

PEREMBA HASIL

**PANITIA PELAKSANA PEREMBA HASIL PERJULIHAN
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN
BATAS WILAYAH NEGARA**

Dr. MARDIANA BRUMA, M.Sc.
NIP. 19670001208031001

KONSULTAN PERENCANA



I. Eko Nugroho Prayogo, S.T., S.T.
Gardara

Andak

Opd

Direkt

CATATAN

GAMBAR

SKALA

PERSPEKTIF

NON SKALA

LIR

JML. LIR

KODE

PTD